

Judul : Banjir barang impor murah, SNI jaminan mutu hasil industri lokal
Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banjir Barang Impor Murah SNI Jaminan Mutu Hasil Industri Lokal



Hendry Munief

ANGGOTA Komisi VII DPR Hendry Munief mendorong syarat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) produk bisa jadi instrumen kedaulatan negara. Penerapan regulasi ini harus mampu memperkuat posisi seluruh pelaku industri nasional secara nyata.

Hendry menilai, penguasaan standar merupakan kunci utama dalam memenangkan seluruh persaingan global yang kian ketat. Setiap negara yang sukses menguasai standar produk akan jauh lebih mudah mengendalikan pasar internasional. Itu sekaligus mempercepat penetrasi produk lokal ke berbagai negara tujuan ekspor.

SNI, kata Hendry, harus terus didorong agar bisa jadi instrumen kedaulatan penuh bagi komoditas dalam negeri. Masyarakat tidak boleh hanya jadi pengguna standar global yang dibuat oleh pihak asing. "Seluruh elemen bangsa wajib bergerak bersama agar bisa jadi penentu arah perdagangan internasional," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Hendry mengatakan, SNI kudu harmonis dengan standar internasional seperti ISO (International Organization for Standardization) dan IEC (International Electrotechnical Commission). Hal itu akan

membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global secara luas. Upaya strategis ini diharapkan mampu mendorong performa serta nilai volume penjualan komoditas lokal.

Dia mengingatkan, risiko besar jika industri dalam negeri ternyata belum siap bersaing ketat. Harmonisasi tanpa penguatan sektor industri dapat memperbesar masuknya produk impor ke pasar domestik. "Agenda itu adalah peluang ekspor, tapi juga bisa jadi ancaman jika industri nasional belum kuat," ingatnya.

Karena itu, Hendry mendorong penerapan kebijakan perlindungan komoditas lokal seperti *technical barriers to trade*. Langkah itu bertujuan untuk menjaga seluruh pasar dalam negeri dari serbuan produk luar berkualitas rendah. Hambatan teknis ini diproyeksikan mampu melindungi stabilitas total perdagangan domestik secara berkelanjutan.

Hendry menyebut, seluruh kebijakan SNI harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional Indonesia. Keberpihakan itu diwujudkan melalui penguatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. "Langkah ini sekaligus mencakup proteksi komprehensif terhadap eksistensi para pelaku industri lokal," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu menambahkan, SNI memiliki peran besar dalam perlindungan konsumen. Regulasi itu juga berfungsi sebagai benteng kokoh bagi produk lokal dari serbuan barang impor murah yang membanjiri pasar. Perlindungan ini diharapkan menjaga keberlangsungan seluruh sektor perdagangan domestik. ■ PYB